

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MELALUI E-PUSKESMAS PADA PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI DKI JAKARTA

<sup>1</sup>Rachma Indah Rifaniar

<sup>2</sup>Antik Bintari

<sup>3</sup>Ufa Anita Afrilia

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: [rachma18001@mail.unpad.ac.id](mailto:rachma18001@mail.unpad.ac.id)

### *Abstract*

*This research was conducted at the Manggarai Village Health Center DKI Jakarta with the aim of analyzing and describing the implementation of e-Government in the Health Service System Through e-Puskesmas at the Manggarai Village Health Center DKI Jakarta based on 5 aspects of readiness in implementing e-Government according to Indrajit, namely Technology Infrastructure, Readiness Human Resources in Government, Availability of Funds and Budget, Legal Instruments and Paradigm Change. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique used was literature study and field study which consisted of interviews, observation and documentation, then supported by swot analysis. The results of the study show that the implementation of e-Government in the health service system through e-Puskesmas at the Manggarai District Health Center in DKI Jakarta has been implemented quite well even though there are still some obstacles.*

*Keyword: e-Government, e-Puskesmas, Health Service System.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta berdasarkan 5 aspek kesiapan dalam melaksanakan *e-Government* menurut Indrajit, yaitu Infrastruktur Teknologi, Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan, Ketersediaan Dana dan Anggaran, Perangkat Hukum dan Perubahan Paradigma. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi Pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu didukung dengan analisis swot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan melalui e-Puskesmas di Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta sudah cukup diterapkan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala.

Kata kunci: *e-Government*, e-Puskesmas, Sistem Pelayanan Kesehatan.

## Latar Belakang

Revolusi Industri telah memberikan perubahan yang sangat besar pada bidang teknologi di dunia. Berawal dengan munculnya tenaga uap dan tenaga air di abad ke-18 dan 19 pada revolusi industri pertama, dilanjut dengan perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi dan otomasi yang mengarah pada revolusi industri keempat yaitu perkembangan sistem fisik *cyber*. Di era Revolusi Industri 4.0, sistem terintegrasi yang dapat saling bekerja sama akan memungkinkan otomatisasi peralatan dan perlengkapan. Teknologi ini juga membantu memecahkan masalah dan memantau proses sekaligus meningkatkan kinerja bisnis dan produksi dalam skala besar. Tentunya penerapan industri ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi, informasi dan teknologi dewasa ini berkembang dengan cepat, tidak hanya di bidang industri, tetapi juga di bidang lain seperti bidang kesehatan. Penggunaan teknologi menawarkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem tradisional. Oleh karena itu, hampir seluruh negara memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai sistem, terutama yang berhubungan dengan sistem pemerintahan. Kemajuan teknologi telah diterapkan di aneka macam bidang, sebagai akibatnya kemajuan teknologi dapat mendukung efektivitas dan menaikkan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Pemerintah sudah berupaya untuk menaikkan kualitas pengelolaan pemerintahan pada menyampaikan pelayanan kepada rakyat menggunakan dukungan perkembangan teknologi.

*Electronic government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi pemerintah dalam rangka menaikkan pelayanannya pada warga. Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *e-Government* pemerintah Indonesia menetapkan untuk menerapkan *e-Government* di Indonesia. *e-Government* merupakan suatu bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab

tuntutan dan kebutuhan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan *e-Government* pada sistem pemerintahannya. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan nilai *e-Government* tertinggi pada tahun 2015 dan mampu mempertahankan posisinya selama dua tahun berturut-turut. Dengan hasil ini, DKI Jakarta dinilai sudah baik dalam menjalankan pemerintahan dan menentukan kebijakan berbasis teknologi informasi. Hal ini memudahkan para warga masyarakat, khususnya Jakarta untuk mengakses segala informasi mengenai pemerintahan ataupun mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat.

Implementasi *e-Government* ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap instansi guna mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha dan industri.

Puskesmas Kelurahan Manggarai merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Puskesmas juga ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia dengan tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pelayanan dalam bidang kesehatan harus terus dikembangkan sebab pelayanan dalam fasilitas kesehatan membutuhkan kecepatan, ketepatan dan ketelitian. Salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan yang saat ini sudah berkembang dalam mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah *electronic health (e-Health)*. *e-Health* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Keputusan Menteri

Kesehatan No. 192/MENKES/SK/VI/2021 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia, Pemerintahan memberikan dukungannya dalam pengembangan *e-Health*. Dalam Kepmenkes tersebut dijelaskan bahwa Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang didukung oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan IPTEK, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk unsur informasi kesehatan dijelaskan bahwa bentuk pokoknya adalah pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang memadukan sistem informasi kesehatan daerah dan sistem informasi lain yang terkait. Sumber data yang direncanakan adalah dari sarana kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan yang teratur dan berjenjang serta dari masyarakat yang diperoleh dari survei, surveillance, dan sensus. Beberapa aplikasi juga telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan yaitu Aplikasi SIK untuk fasyankes (SIKDA, Puskesmas, RS) dan Aplikasi SIK untuk Dinas Kesehatan (SIKDA dan DHS2). SIKDA dikembangkan sebagai aplikasi generik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh dinas kesehatan di berbagai kabupaten/kota.

Dalam upaya penerapannya, pada tahun 2019 Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta menggunakan e-Puskesmas sebagai aplikasi dari pemantauan Sistem Informasi Kesehatan. e-Puskesmas merupakan perangkat berbasis website dan terintegrasi dengan aplikasi *mobile* yang didalamnya terdapat fitur untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas, e-Puskesmas adalah sistem manajemen yang dapat memonitoring pelayanan kesehatan antara pihak puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

PT Telkom Indonesia bersama dengan PT Infokes Indonesia mulai melakukan implementasi produk e-Puskesmas sejak tahun 2013, saat ini sudah lebih dari 1000 puskesmas

dan 50 dinas Kesehatan Kota/Kabupaten di Indonesia yang menggunakan e-puskesmas.

Dalam pengoperasiannya, e-Puskesmas didukung oleh aplikasi Infokes Mobile Apps sebagai aplikasi yang akan memudahkan masyarakat dalam solusi kesehatan. Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan pendaftaran ke fasilitas kesehatan tanpa perlu antri ketika hendak berobat. Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi kesehatan langsung dengan dokter.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam Proses Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta, dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya apa saja yang perlu dilakukan terhadap hasil analisis (SWOT) dalam Proses Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian didukung dengan analisis SWOT. Pada penelitian ini, informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tingkat kesiapan dalam penerapan *e-Government* menurut Indrajit dengan meninjau dari 5 indikator yaitu, Infrastruktur Teknologi, Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, Ketersediaan Dana dan Anggaran, Perangkat Hukum dan Perubahan Paradigma. Setelah melakukan penelitian dengan studi Pustaka dan studi lapangan, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi catatan dan penulis tuang dengan mengkategorikan sesuai dengan indikator yang ditinjau.

#### Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dalam Infrastruktur Teknologi

Teknologi dalam penerapan *e-Government* pada dasarnya tentang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat. Pada sebagian instansi pemerintah, perangkat keras dan perangkat lunak yang ada masih berfungsi dengan baik. Hasilnya, kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan aturan untuk membangun infrastruktur portal pemerintah serta instruksi untuk mengoperasikan situs web pemerintah daerah. Dengan aturan yang sudah ada, diharapkan implementasi *e-Government* akan lebih baik. Website yang ada saat ini harus dimodifikasi menjadi portal web yang mampu melakukan interaksi dan transaksi elektronik, terutama untuk pengembangan website yang mengarah pada pengembangan *e-Government* tingkat kedua dan ketiga. Setiap perangkat daerah yang ada harus memiliki website sendiri, yang akan dihosting di subdomain/subdirektori portal web yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis membagi aspek infrastruktur teknologi menjadi 3 bagian yaitu, Perangkat Operasional, Pemilihan Server dan Kualitas Jaringan Internet.

#### a. Perangkat Operasional

Ketersediaan perangkat operasional dalam implementasi *e-Government* di Puskesmas Kelurahan Manggarai pada dasarnya disediakan oleh Puskesmas Kecamatan. Perangkat dan server sudah disediakan oleh Puskesmas Kecamatan Tebet. Untuk jumlah perangkat terdapat 5 buah tablet dan sudah cukup untuk pengoperasiannya. Dengan pembagian perangkat 2 tablet di KB, 2 tablet di BPU. Untuk yang lain menggunakan komputer seperti loket, apotek. Sebagian masih menggunakan komputer karena tablet hanya untuk *mobile*.

Hal ini diperkuat dengan data jumlah barang yang tercatat pada Kartu Inventaris Ruangan di Puskesmas Kelurahan Manggarai. Dari data tersebut kemudian penulis mencatat ulang jumlah perangkat operasional yang digunakan untuk pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Kelurahan Manggarai.

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Komputer	3 unit
2.	Laptop	2 buah
3.	Tablet	5 buah

Sumber: Kartu Inventaris Ruangan Puskesmas Kelurahan Manggarai 2022

Berdasarkan data di atas mungkin dapat dikatakan bahwa ketersediaan perangkat operasional pada Implementasi *e-Government* dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta sudah tercukupi untuk proses pelayanan. Akan tetapi dalam

prakteknya masih terdapat kendala seperti masih kurangnya sarana dan prasana pendukung dalam proses pelaksanaan pelayanan melalui e-puskesmas, sepertinya kurangnya jumlah PC di Puskesmas Kelurahan Manggarai.

### **b. Pemilihan Server**

Di era digital saat ini, rasanya sudah banyak instansi pemerintah yang melaksanakan *e-Government*. Begitu pun dengan server, tentunya banyak pegawai yang sudah tidak asing dengan *hardware* dan/atau *software* yang biasa digunakan untuk menyimpan data-data. Puskesmas Kelurahan Manggarai merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan yang sedang melaksanakan *e-Government* pada sistem pelayanannya.

Dr. Sudewi (25/10) menjelaskan Puskesmas Kelurahan Manggarai sudah menerapkan sistem *paperless* sejak 2010 dengan menggunakan aplikasi SIKDA Optima yang dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dirancang oleh *Tim IT* Puskesmas Kecamatan Tebet. Namun pada tahun 2019, Puskesmas Kelurahan Manggarai beralih aplikasi dari SIKDA Optima menjadi aplikasi e-Puskesmas.

### **c. Kualitas Jaringan Internet**

Dalam melaksanakan sebuah *e-Government* tentunya setiap instansi harus memiliki kualitas jaringan internet yang baik. Begitu pun dengan Puskesmas Kelurahan Manggarai yang sudah menerapkan *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan pastinya membutuhkan kualitas jaringan internet yang cukup baik dan mampu membantu kerja para pegawai. Saat ini, Puskesmas Kelurahan Manggarai sudah memiliki jaringan internet dengan kualitas yang cukup baik. Hal itu pun disampaikan oleh

dr. Sudewi selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Manggarai.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dilihat bahwa implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan melalui e-Puskesmas di Puskesmas Kelurahan Manggarai dalam lingkup infrastruktur teknologi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pelaksanaan pelayanan melalui e-puskesmas dapat berjalan dengan baik.

### **Implementasi e-Government Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dalam Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah**

Kapasitas sumber daya manusia mengacu pada kemampuan seseorang atau organisasi. Tujuan, efektivitas dan efisiensi kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam menciptakan output dan outcome pada sebuah instansi. Sumber daya manusia merupakan penggerak dalam mencapai visi dan misi pada suatu organisasi, Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu kesiapan sebuah instansi dalam menerapkan *e-Government* dikarenakan dapat memberi pengaruh yang besar bagi pelaksanaan suatu hal yang dianggap baru. Sumber daya manusia akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan dalam menjalankan implementasi *e-Government* dilihat dari bagaimana aparatur menjalankan sesuai dengan tugasnya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana kualitas aparatur yang tersedia untuk mendukung atau tidaknya Implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Kelurahan Manggarai.

Pemerintah daerah dalam mendukung implementasi *e-Government* pada proses pengembangan sumber daya manusia dapat melakukan upaya berupa

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendidikan dan Pelatihan serta melakukan sosialisasi. Seperti yang diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia yang terdapat di setiap daerah di Indonesia berbeda, namun secara umum sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan *e-Government* diasumsikan terbatas, sebab *e-Government* berkolerasi positif dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi (termasuk komputer) sekaligus internet. Kelemahan tersebut dapat menghambat kelancaran implementasi *e-Government* di daerah dan berpengaruh pada pelayanan masyarakat, seperti pemerintah tidak mampu melayani masyarakat secara online. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dapat ditinjau dari keberadaan aparatur apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam implementasi *e-Government* dalam sistem pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kelurahan Manggarai sebagaimana dijelaskan oleh dr. Sudewi (25/10) sudah sesuai dengan latar belakang dari setiap pelaksana layanan kesehatan dan sudah jumlahnya sudah cukup untuk membantu proses dari implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan.

Dapat dilihat kesiapan dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Kelurahan Manggarai sudah cukup siap. Dengan jumlah sumber daya manusia yang seadanya, Puskesmas Kelurahan Manggarai mampu melakukan implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan dengan baik dan tentunya para sumber daya manusia di Puskesmas Kelurahan Manggarai telah mengerti akan konsep *e-Government* dan sudah bisa menjalankan beberapa peranan

dalam implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan.

### **Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dalam Ketersediaan Dana dan Anggaran**

Puskesmas Kelurahan Manggarai merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam hal ini, kesiapan dana dan anggaran yang dimiliki Puskesmas Kelurahan Manggarai dalam melaksanakan *e-Government* didapatkan dari Puskesmas Kecamatan Tebet. Dana yang dipakai oleh Puskesmas Kecamatan Tebet sendiri terdapat dari beberapa sumber dana, seperti yang dijelaskan oleh bu Min selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Tebet bahwa terdapat beberapa sumber dana yaitu:

1. APBD DKI Jakarta, yang merupakan dana yang diberikan langsung oleh pemerintah DKI Jakarta.
2. Pemasukan pribadi yang terdiri dari:
  - a. BPJS, hal ini merupakan dana kapitasi yang diberikan untuk FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
  - b. Masyarakat, hal ini merupakan dana yang didapatkan dari masyarakat non bpjs yang berobat dan melakukan pembayaran secara cash.
3. Dana Alokasi Khusus.

Anggaran yang didapatkan Puskesmas Kelurahan Manggarai dalam pelaksanaan *e-Government* setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 13.290.000 atau setiap bulannya sebesar Rp. 1.107.500, dana tersebut di alokasikan untuk pemeliharaan sistem e-Puskesmas. Pemberian anggaran tersebut tidak diberikan secara cash dari Puskesmas Kecamatan Tebet kepada Puskesmas Kelurahan Manggarai

melainkan anggaran tersebut diberikan langsung kepada penyedia jasa dari e-Puskesmas yaitu PT. Telkom. Selain itu, untuk anggaran lain yang digunakan dalam kegiatan operasional *e-Government* juga dilakukan satu pintu melalui Puskesmas Kecamatan Tebet.

Dari penjelasan diatas, dijelaskan bahwa sumber dana anggaran Puskesmas Kelurahan Manggarai berasal dari Puskesmas Kecamatan Tebet yang memiliki sumber anggaran dari APBD DKI Jakarta, Jasa Kapitasi BPJS, Masyarakat dan Dana Alokasi Khusus.

#### **Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dalam Perangkat Hukum**

Pelaksanaan *e-Government* pada suatu instansi pemerintah tentunya dilandasi oleh sebuah peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu pun dengan melaksanakan sebuah sistem pelayanan kesehatan tentu dilandasi oleh sebuah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaannya. Perangkat hukum sangat berhubungan dengan kemampuan pembuatan dan pengelolaan data dan informasi dari seorang pihak ke pihak lain untuk melihat apa saja yang berkaitan dengan kebijakan implementasi *e-Government* serta dalam sistem pelayanan kesehatan. Suatu kebijakan harus memiliki data dan informasi, hak paten dan intelektual dapat terlindungi dengan UU dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan.

e-Puskesmas merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan dan pencatatan informasi kesehatan. Dalam hal ini, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam program *e-Health* yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.

374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 192/MENKES/SK/IV/2021 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan. Selain itu, e-Puskesmas juga merupakan media dalam rekam medis elektronik yang dalam hal ini rekam medis elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Namun, pelaksanaan *e-Health* atau sistem informasi kesehatan dan rekam medis elektronik belum diatur dalam peraturan daerah. Hal ini juga disampaikan oleh dr. Sudewi (25/10) mengenai perangkat hukum yang mengatur tentang e-puskesmas ataupun pelaksanaan sistem ini.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masih terbatasnya informasi mengenai peraturan yang mengatur tentang *e-Health* atau sistem tersebut di lingkungan Puskesmas Kelurahan Manggarai. Maka dalam hal ini, peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan *e-Government*.

#### **Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta dalam Perubahan Paradigma**

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk membangun diri demi mencapai kemajuan berbangsa dan menikmati hasil pembangunan yang dicapai. Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia di tengah era globalisasi ini. *e-Government* merupakan bentuk upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah, menggunakan elektronika dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Sistem

manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan ditata melalui pengembangan *e-Government* yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut meliputi dua kegiatan yang saling berhubungan yaitu, pengolahan data elektronik, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja dan pemanfaatan teknologi informasi agar masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan terjangkau.

Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai dalam perkembangan dari menggunakan sistem tradisional hingga saat ini menggunakan konsep *e-Government* dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan tentunya terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan pelayanan. Hal ini pun berpengaruh terhadap kerja pegawai puskesmas dalam melaksanakan pekerjaannya yang saat ini berbasis elektronik, menurut dr. Sudewi mengenai perbedaan pelaksanaan pelayanan menggunakan konsep *e-Government*.

Selain itu, Ismania selaku staff Poli Gizi juga menjelaskan bahwa dengan adanya e-Puskesmas ini sangat membantu karena data pasien dapat tercatat dan dapat diakses lebih mudah sehingga saat pasien berobat di wilayah sekecamatan dapat diakses juga melalui e-Puskesmas. Ibu Eka selaku Tata Usaha juga menambahkan sebagai berikut.

Selain itu perubahan paradigma disini bukan hanya semata-mata dari sisi pelaku pelayanan di pemerintahan tetapi apakah masyarakat sekitar sudah memiliki pandangan terkait implementasi *e-Government* atau memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mendapatkan efek dari implementasi *e-Government* ini. Terdapat pandangan masyarakat setempat mengenai implementasi *e-Government* dalam sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas

Kelurahan Manggarai yang merasakan perbedaan dalam hal pelayanan. Seperti yang diketahui, aplikasi e-Puskesmas juga didukung oleh aplikasi lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di Puskesmas Kelurahan Manggarai yaitu, aplikasi infokes mobile app atau sekarang menjadi klinis mobile app. Pada aplikasi tersebut masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online di Puskesmas Kelurahan Manggarai dan mengecek antrean.

Dalam Hal tersebut dijelaskan oleh Putri Handayani salah seorang masyarakat tebet yang turut merasakan perbedaan dari sistem pelayanan berbasis elektronik di Puskesmas Kelurahan Manggarai. Selain itu, Marthasyah salah seorang masyarakat manggarai yang juga menggunakan aplikasi infokes untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kelurahan Manggarai.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan konsep *e-Government* memang diharapkan menjadi sebuah inovasi yang menjadikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berjalan secara efektif.

#### **Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat) Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta**

Analisis SWOT merupakan teknik yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi yang dihadapi organisasi sebagai upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang terdiri dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang berasal dari factor internal ataupun eksternal. Analisis SWOT juga disebut sebagai identifikasi dalam membuat strategi Lembaga atau dinas. Analisis swot memilih pengaruh dalam kemajuan bidang

instansi yang saat ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Berikut penulis sajikan tabel analisis SWOT secara sederhana dari implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta:

**Tabel 4.2 Pemaparan SWOT**

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
1. Pemilihan server dan infrastruktur sudah cukup membantu walaupun masih memerlukan perbaikan berkala. 2. Latar belakang SDM yang sudah sesuai dengan tupoksi. 3. Adanya Kepmenkes dan PKM yang mengatur tentang <i>e-Health</i> dan Rekam Medis Elektronik.	1. Tidak adanya peraturan daerah mengenai <i>e-Government</i> terutama pada bidang kesehatan ( <i>e-Health</i> ) dan rekam medis elektronik.
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>
1. Penyederhanaan alur/mekanisme pengajuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1. Kemungkinan terjadinya server dan internet down dapat menghambat jalannya pemeriksaan melalui e-Puskesmas. 2. Masih terdapat masyarakat yang belum melek

	teknologi (gaptek).
--	---------------------

(Sumber: Penulis, 2022)

**Upaya Alternatif dari hasil SWOT**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan di atas, berikut penulis paparkan rekomendasi dari upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait Implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI Jakarta:

1. Dalam implementasi *e-Government* para pelaksan pelayanan dapat melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan arahan hal apa saja yang membuat efektif dalam mendapatkan pelayanan melalui aplikasi infokes mobile app atau klinisia mobile app.
2. Meskipun sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai tetapi pihak puskesmas harus tetap mengantisipasi akan terjadinya internet yang down pada saat proses pelayanan dengan caranya memiliki *back up* internet dan melakukan penyimpanan file rekapan rekam medis dalam bentuk *excel* agar pada saat terjadi server down dokter ataupun petugas pelayanan masih tetapi bisa melihat Riwayat dari pasien.
3. Mengusulkan pembuatan peraturan daerah mengenai *e-Health* agar implementasi *e-Government* terkhusus pada bidang kesehatan di wilayah DKI Jakarta lebih tersusun dan jelas karena berlandaskan pada peraturan tersebut.

**Simpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas terkait implementasi *e-Government* Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Melalui e-Puskesmas Pada Puskesmas Kelurahan Manggarai DKI

Jakarta, penelitian mengambil kesimpulan bahwa dalam implementasi *e-Government* pada sistem pelayanan kesehatan tersebut sudah cukup diterapkan dengan baik oleh Puskesmas Kelurahan Manggarai hal ini dibuktikan dengan hasil analisis penulis dan didukung dengan hasil wawancara serta bukti lapangan.

## Referensi

- Andriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisa dan Kajian*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Arifin, S., Rahman, F., Wulandari, A., & Anhar, V. Y. (2016). *Dasar - Dasar Manajemen Kesehatan*. Pustaka Buana.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu
- Husaini Usman, 1950-; Purnomo Setiady Akbar, 1956-. (2006). *Metodologi penelitian sosial / Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Indrajit, R. E. (2002). *electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indrajit, R. E. (2005). *electronic Government in action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kencana Syafii, Inu. (2017). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utami, T. N. (2015). *Perspektif Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Deepublish.
- Rangkuti, F. (2019). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sriyanti, C. (2016). *Mutu Layanan Kebidanan & Kebijakan Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *e-Government*
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 192/MENKES/SK/VI/2021 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- Fachriza, D.G. (2021). *Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online Di Disnaker Kota Bandung Tahun 2020*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran: Jatinangor.
- Salsabila, D.I.R. (2022). *Implementasi E-Government Dalam Pencatatan E-KTP (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka 2019)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran: Jatinangor.
- “Jakarta, Provinsi Dengan *e-Government* Terbaik | Databoks.” *Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia / Databoks*, 2016. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-Government-terbaik>